

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*, Cetakan ke-1. (Bandung: Alumni, 1987).
- Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Business Judgement Rule*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Tatanusa, 2008).
- Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2017).
- EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan ke-3. (Jakarta: Stora Grafika, 2003).
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-3. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, Cetakan ke-8. (St. Paull-Minn: West Publishing Co, 2004).
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-6. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Cetakan ke-1. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

- H. Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Jusly, M. Penus Sagala. *Perbuatan Dianggap Korupsi Beserta Penjelasannya*, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Khairandy,Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- Machmudin, Dudu Daswara. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6. (Jakarta: Kencana,2010).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14. (Jakarta: Prenadamedia Group,2019).
- Miller, Roger LeRoy dan Gaylord A. Jentz, *Business Law Today: The Essentials*. (Cengage Learning, 2007).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-5. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* Cetakan ke-1, (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2004).

- Prasetio. *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014).
- Purnomo, Bambang. *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Aksara Baru, 1999).
- Rasdjiji, Lili dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-1. (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999).
- Rajagukguk,Erman. *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006).
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, (Surabaya: Laks Bang Yustisia, 2010).
- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. (Semarang: Pustaka Magister, 2011).
- R. Tresna. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Tiara Limitet, 1959).
- Saleh, Roeslah. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Aksara Baru, 1999).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: UI-Press,2008).

- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-4. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013).
- Sulistiowati. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017).
- Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Syamsudin, Azia. *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan ke-1. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009).
- Widjaya, I.G Rai. *Hukum Perusahaan : Khusus Pemahaman atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995*, Cetakan ke-6. (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006).

## **B. Jurnal Hukum**

- Affandhi, Fransdkk, “Business Judgement Rule Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis yang Diambil”, *USU Law Journal*, Vo.4, No.1 Tahun 2015.
- Ais, Chatamarrasjid, “Fiduciary Duty sebagai Standar Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun 2001.
- Gary, Muhammad Gagarin Akbar, “Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis”, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1 Tahun 2016.
- Lestari, Sartika Nanda, “Business Judgement Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”, *Jurnal Notarius*, No. 2, Edisi 08 Tahun 2015.
- Pramono,Nindyoy, “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol 5, No. 3 Tahun 2007,
- Siswanto,Dwi, “Kesadaran dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Humanisme Jean-Paul Sartre”, *Jurnal Filsafat*, Tahun 1997.
- Sutan, Sjahdeni Remi, “Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 14 Tahun 2001.
- Verdiansyah Arie Putra, Tri Andrisman, dan Maroni, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kasus Korupsi Yang Dilakukan

Secara Bersama Pada Unit Pengelola Kegiatan Pagelaran (Studi Putusan No.06/Pid/TPK /2013/PT.TK)”, *Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol 3 No. 1 Tahun 2015.

### **C. Artikel Hukum**

Hafizh, Muhammad Akram dan Nisriina Primadani Fanaro, “Implementasi Doktrin Business Jugsment Rule Di Indonesia”, <http://hafizhakrams.blogspot.com/2019/05/implementas-doktrin-business-judgement.html?m=1>, 12 September 2020.

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*  
\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara* .  
\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*

### **E. Putusan**

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.  
\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Tinggi No. 34/PID.TPK/2019/PT DKI.  
\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI  
\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.